

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, perkembangan inflasi di Kabupaten Bintan secara umum masih berada dalam kondisi **terkendali**, meskipun terdapat fluktuasi harga pada beberapa komoditas barang kebutuhan pokok dan penting. Pergerakan harga terutama dipengaruhi oleh faktor musiman awal tahun, kondisi pasokan, serta dinamika permintaan masyarakat.

Komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras menjadi penyumbang utama volatilitas harga. Kenaikan harga pada komoditas tertentu dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan, ketergantungan distribusi dari luar daerah, serta faktor cuaca yang memengaruhi produksi dan kelancaran distribusi. Sementara itu, harga komoditas pangan lainnya relatif stabil seiring dengan ketersediaan pasokan yang cukup.

Pada kelompok barang lainnya dan jasa, perkembangan harga cenderung stabil dengan potensi kenaikan yang terbatas. Penyesuaian harga lebih dipengaruhi oleh biaya operasional, transportasi, serta aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Bintan yang mulai meningkat pada awal tahun, namun masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Ke depan, risiko inflasi di Kabupaten Bintan pada triwulan berikutnya berpotensi bersumber dari faktor musiman, kondisi cuaca, kelancaran distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi TPID Kabupaten Bintan, pemantauan harga secara rutin, pengamanan pasokan, dan pengendalian distribusi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2025, pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan masih menghadapi sejumlah permasalahan utama. Fluktuasi harga pada komoditas barang kebutuhan pokok dan penting, khususnya pangan strategis, masih terjadi akibat keterbatasan pasokan dan ketergantungan distribusi dari luar daerah. Kondisi cuaca dan faktor musiman turut memengaruhi ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas tersebut.

Selain itu, tekanan inflasi pada kelompok jasa mulai meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat, terutama pada sektor perawatan pribadi dan penyediaan makanan dan minuman. Tantangan lainnya berasal dari tingginya biaya distribusi dan logistik antarpulau yang berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan pada Triwulan I

Tahun 2025 antara lain:

1. **Ketergantungan pasokan dari luar daerah**

Sebagian besar komoditas pangan strategis masih dipasok dari luar Kabupaten Bintan sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga.

2. **Fluktuasi harga komoditas pangan strategis**

Harga beras, cabai, bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras masih mengalami volatilitas akibat faktor pasokan dan permintaan musiman.

3. **Kondisi cuaca dan faktor musiman**

Cuaca yang tidak menentu memengaruhi produksi dan kelancaran distribusi komoditas

pangan, terutama pada awal tahun.

4. **Tingginya biaya distribusi dan logistik antarpulau**

Karakteristik wilayah kepulauan menyebabkan biaya transportasi relatif tinggi, yang berdampak pada harga jual di tingkat konsumen.

5. **Tekanan inflasi pada kelompok jasa**

Peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat mendorong kenaikan harga pada sektor jasa, khususnya perawatan pribadi dan restoran.

6. **Keterbatasan efektivitas intervensi pasar**

Pelaksanaan operasi pasar dan stabilisasi harga masih perlu dioptimalkan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

7. **Perlunya penguatan koordinasi lintas sektor**

Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan pada triwulan I tahun 2025. Beberapa kegiatan di triwulan I ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pemantauan Harga Bapokting
2. Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bintan
3. Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah
4. Pengamanan Ketersediaan Pasokan Pangan
5. Pengendalian Distribusi dan Logistik
6. Komunikasi Publik Pengendalian Inflasi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Tekanan permintaan musiman** masih menjadi tantangan utama, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang merah seiring meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
2. **Kenaikan permintaan barang dan jasa** turut terjadi pada kelompok makanan, minuman, transportasi, serta jasa akomodasi, yang dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata di wilayah Kabupaten Bintan.
3. **Pelaksanaan operasi pasar/pasar murah** telah berkontribusi dalam menjaga keterjangkauan harga, namun perlu terus diintensifkan dan dipastikan ketepatan sasaran serta waktu pelaksanaannya, khususnya menjelang HBKN Idul Fitri, dengan dukungan koordinasi melalui rapat TPID dan High Level Meeting (HLM).
4. **Peran BUMD dalam pengendalian inflasi** masih perlu diperkuat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga melalui optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah sentra produksi.
5. **Pengawasan harga dan ketersediaan stok** telah dilakukan secara berkala, namun perlu ditingkatkan untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar serta praktik penimbunan yang berpotensi mengganggu stabilitas harga.
6. **Komunikasi kebijakan pengendalian inflasi** kepada masyarakat telah dilakukan melalui berbagai kanal informasi, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi intensitas, konsistensi, dan kejelasan pesan guna mengelola ekspektasi inflasi secara efektif.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian bahan pangan pokok

7.

strategis telah berjalan, namun masih membutuhkan penguatan dari sisi keberlanjutan program, integrasi data, serta evaluasi dampak kebijakan secara berkala.

8. **Upaya edukasi dan imbauan kepada masyarakat** untuk berbelanja sesuai kebutuhan telah dilaksanakan, namun efektivitasnya perlu terus diperkuat untuk menekan lonjakan permintaan yang bersifat spekulatif.
9. **Monitoring kesiapan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara** terus dilakukan guna menjamin kelancaran distribusi bahan pangan strategis, sejalan dengan karakteristik wilayah kepulauan Kabupaten Bintan.
10. **Penguatan pengawasan tarif dan layanan transportasi**, termasuk agen tiket offline, serta koordinasi dengan pelaku usaha, maskapai, dan otoritas pelabuhan dan bandara, menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko tekanan inflasi dari sisi biaya distribusi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. **Penguatan dukungan stabilisasi pasokan pangan strategis**, khususnya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai, dan bawang merah, melalui kebijakan distribusi dan penugasan BUMN pangan ke wilayah kepulauan.
2. **Penguatan kebijakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)** antara daerah sentra produksi dan daerah konsumen, termasuk fasilitasi transportasi dan logistik oleh Pemerintah Pusat untuk menekan biaya distribusi.
3. **Dukungan anggaran dan kebijakan operasi pasar nasional**, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), agar pelaksanaannya lebih masif dan tepat sasaran di daerah kepulauan.
4. **Peningkatan pengawasan harga dan stok secara nasional**, termasuk sinergi lintas kementerian/lembaga untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi yang berdampak pada kenaikan harga di daerah.
5. **Penguatan kebijakan transportasi dan logistik pangan**, terutama pada moda laut dan udara, guna menjamin kelancaran distribusi bahan pangan pokok strategis ke wilayah kepulauan seperti Kabupaten Bintan.
6. **Penguatan sistem komunikasi kebijakan pengendalian inflasi nasional**, agar pesan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan dapat tersampaikan secara konsisten hingga ke tingkat daerah.
7. **Fasilitasi penguatan peran BUMD daerah**, melalui regulasi dan pendampingan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan cadangan pangan dan distribusi komoditas strategis.